

Kemendikbud Tidak Tinggal Diam

Penyimpangan Proyek

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak mau ketinggalan dalam urusan mengawasi sejumlah proyek pembangunan yang melibatkan sosok Muhammad Nazaruddin. Sejumlah petinggi kampus yang mulai terseret, siap dijatuhi hukuman berat jika terbukti bersalah.

Kiprah Nazaruddin yang sudah mulai disidang dalam proyek Kemendikbud tidak main-main. Sejak 2007 hingga 2010, diperkirakan ada 26 tender proyek pengembangan perguruan tinggi negeri yang dimenangkan perusahaan PT Anugrah Nusantara, bentuk mantan bendaharan umum Partai Demokrat tersebut.

Wakil Mendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim di Jakarta kemarin tidak menyangkal jika beberapa lembaga penegak hukum sudah menyisir rekam jejak proyek-proyek yang terkait Nazaruddin. Namun, pejabat yang masih merangkap menjadi Plt Irjen (Inspektur Jendral) Kemendikbud belum berani membeber perkembangan penyisiran tersebut.

"Informasi detailnya saya belum tahu," tandasnyadi Jakarta kemarin (3/12). Mantan rektor Universitas Andalas Padang itu menjelaskan, Kemendikbud tidak akan menutup-nutupi atau menghambat kerja aparat penegak hukum. Dia menegaskan, Mendiknas Muhammad Nuh menginstruksikan kepada seluruh jajarannya supaya terbuka dan bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Musliar sendiri, menjelaskan Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendiknas juga terus berupaya mencegah terjadinya peluang korupsi di seluruh tender-tender proyek yang sedang dan akan digulirkan. Khusus untuk proyek-proyek yang sudah bergulir dan terkait dengan Nazaruddin, Musliar memilih menunggu klarifikasi resmi dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan juga dari Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK).

Musliar juga menegaskan, kedepan pihaknya akan terus mengawasi dengan ketat pelaksanaan proyek-proyek di Kemendikbud. Mulai dari proyek jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Musliar mengatakan, Kemendikbud sedang gencar menarget perolehan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk meraih target tadi, seluruh proyek-proyek yang digulirkan Kemendikbud harus bersih tanpa ada catatan atau temuan aliran dana janggal dari BPK.

Bentuk pengetatan pelaksanaan proyek dimulai ketika masih tahap perencanaan, pelelangan, hingga penetapan pemenang lelang. Selanjutnya, selama proses pengerjaan proyek juga terus dipantau. "Jangan sampai ketika tempo pengerjaan selesai, proyeknya masih belum rampung," katanya. Jika benar-benar tidak terselesaikan, uang proyek harus masuk kembali ke kas negara bersama denda yang dipungut dari pemenang proyek.

Aroma suap proyek yang terkait Nazaruddin juga tidak hanya tertuju ke institusi lembaga pendidikan tinggi. Tetapi juga duit proyek dari perusahaan Nazaruddin diduga masuk ke kantong sejumlah rektor. Dugaan aliran duit dari proyek ke kantor rektor beragam bentuk dan jumlahnya. Diantaranya ada duit yang dialirkan untuk perjalanan dinas hingga ongkos karaoke. Jumlahnya pun mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Direktur Jendral Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) Djoko Santoso saat dihubungi kemarin menegaskan secara aturan dan etika rektor dilarang menerima duit dari perusahaan pemenang tender. Apapun bentuknya.

Mantan rektor ITB itu menjelaskan, masih belum berani memberikan sanksi kepada rektor-rektor yang disebut menerima aliran dana dari perusahaan PT Anugrah Nusantara. (wan)